

Dwi Handayani
Listiyono Santoso (editor)

BAHASA

dan **SASTRA**

untuk

**KEBANGKITAN
INDONESIA**

PUSTAKA
RADJA

Dwi Handayani

Listiyono Santoso (Editor)

Bahasa dan Sastra

Untuk Kebangkitan Indonesia

Dalam Rangka Lustrum ke 25 Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

**Pustaka Radja Bekerja Sama dengan
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Airlangga**

Bahasa dan Sastra untuk Kebangkitan Indonesia @ 2014

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, November 2014
Jl. Tales II No. 1 Surabaya.
Tlp. 031-72001887, 081249995403
(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

ANGGOTA IKAPI
No. 137/JTI/2011

Editor : Dwi Handayani
Listiyono Santoso

Layout dan desain sampul: Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-7567-73-3
x+439; 16.5 cm x 24 cm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

Strategi Kesantunan Kritik Dalam Masyarakat Budaya Jawa Mataraman:
Kajian Sosiopragmatik Terhadap Pemakaian Bahasa Sebagai Sarana
Kontrol Sosial - 1

BAB II

Kesantunan Positif Dan Negatif Di Kalangan Masyarakat Etnik Tionghoa
Di Surakarta: Kajian Sosiopragmatik ~ 34

BAB III

Pemerolehan Fonem Anak Pra-Sekolah Yang Berbahasa Indonesia - 67

BAB IV

Fungsi Objek Berpreposisi Pada Verba Transitif - 83

BAB V

Konsep Warna Dalam Kajian Semantik - 92

BAB VI

Peranan Stratifikasi Sosial Dan Ekonomi Terhadap Pergeseran
Penggunaan Kata Sapaan Etnis Madura Di Pamekasan: Suatu Kajian
Sosiolinguistik ~ 104

BAB VII

Meng-Indonesia-Kan (Kembali) Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi - 118

BAB VIII

Permainan Bahasa Dalam Masyarakat Multilingual Di Jawa Timur: Suatu Kajian Sociolinguistik ~ 128

BAB IX

Variasi Bahasa Jawa Sebagai Bentuk Kesantunan Berbahasa Dalam Konteks Tuturan Masyarakat Jawa Timur ~ 150

BAB X

Sastra, Peradaban, Dan Kemanusiaan ~ 176

BAB XI

Bapak, Kematian, Iman: Puitika Cerpen-Cerpen Fransisca Dewi Ria Utari ~ 189

BAB XII

Periode Pemerintahan Orde Baru Dalam Karya Sastra Indonesia: Seno Gumira, Agus Noor, Darmanto Jatman ~ 212

BAB XIII

Kegagalan Untuk Menuju Kemenangan: Tanggapan Atas Novel *Lingkar Tanah Lingkar Air* Karya Ahmad Tohari ~ 234

BAB XIV

Teks Drama *Perahu Retak* Cermin Perselisihan Jawa-Islam Di Awal Kerajaan Mataram Karya Emha Ainun Nadjib: Perspektif Dialogis ~ 244

BAB XV

Serat Wedhatama: Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Karakter Bangsa ~ 261

BAB XVI

Ramayana: Popularitas Budaya Elite ~ 275

BAB XVII

Preliminary Discussion Of Kresna-Kangsa Story - 284

BAB XVIII

Analisis Wacana Kritis Teks Pandangan Penyalin Terhadap Agama-Agama Selain Islam Dalam Naskahkitab *Bustam Salati* - 296

BAB XIX

Eksplanasi Ajian Badung Bandawasa Dan Ajian Mantra Jalasutera Pada Katalog Primbon Di Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta: Pr.9 - 304

BAB XX

Rekonstruksi "Archetype" Warna Lokal Jawa Dalam Sastra Indonesia - 316

BAB XXI

Neurolinguistik: Kajian Bahasa Dan Otak - 338

BAB XXII

Praktik Diskursif *The Theory Of Truth* "Michel Foucault" Dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa Di Indonesia - 353

BAB XXIII

Episteme Kritis Ranggawarsita: Nalar Politik Hibridaisasi Kultural Sang Pujangga - 366

BAB XIV

Madurese Orthography: Literacy In A Dominated Culture' - 398

BAB XXV

Ketirisan Diglosia Dan Kapitalisasi Identitas: Problematika Kebertahanan Bahasa Lokal - 409

BAB XXVI

Peran Pemerintah Belanda Dalam Integrasi Pekerja Migran Di Belanda
Kewajiban Berbahasa Belanda Bagi Pekerja Migran Di Belanda ~ 418

BIODATA PENULIS

BAB I

STRATEGI KESANTUNAN KRITIK DALAM MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN: KAJIAN SOSIOPRAGMATIK TERHADAP PEMAKAIAN BAHASA SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL

Oleh

Dwi Handayani dan Edy Jauhari

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi kesantunan kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat budaya Jawa Mataraman. Tujuan yang hendak dicapai adalah memahami persepsi dan pandangan masyarakat budaya Jawa Mataraman terhadap kritik, memahami strategi kesantunan kritik yang digunakan beserta persebarannya dalam berbagai konteks situasi, dan mengungkapkan intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial serta implikasinya terhadap upaya pencegahan potensi pelanggaran nilai/norma sosial yang berkembang dalam masyarakat budaya Mataraman. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pandangan dan persepsinya terhadap kritik, masyarakat budaya Mataraman dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe. Dalam kaitannya dengan penggunaan strategi, masyarakat budaya Mataraman menggunakan, baik strategi MKV maupun MKH. Strategi MKV pada umumnya memiliki persebaran yang agak rendah dalam konteks yang mengandung fitur (+P), khususnya dalam ranah perkantoran. Dalam konteks seperti itu, intensitas kritik cenderung rendah. Implikasinya adalah manakala terjadi penyimpangan perilaku dalam konteks seperti itu, penyimpangan tersebut cenderung berlarut-larut bahkan terbiarkan tanpa kontrol.

Kata Kunci: *Kritik, Strategi Kesantunan, Kontrol Sosial, Strategi MKV, Strategi MKH*

Pendahuluan

Kritik mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Kritik berfungsi sebagai salah satu sarana untuk melakukan kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol sosial, kritik termasuk jenis kontrol sosial persuasif karena dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan linguistik atau tindakan-tindakan verbal. Sebagai kontrol sosial persuasif, kritik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya sebagai penyeimbang kontrol sosial yang bersifat koersif. Mengingat fungsinya demikian penting, kritik dalam masyarakat tidak seharusnya ditekan apalagi dipadamkan, tetapi justru harus ditumbuhkan dan dikembangkan secara positif agar setiap bentuk penyimpangan sosial dapat segera dikontrol dan dicegah.

Akan tetapi, pengamatan menunjukkan bahwa kritik dalam berbagai kelompok masyarakat di Indonesia tampaknya kurang berfungsi secara maksimal. Banyak orang merasa enggan dan bahkan alergi terhadap kritik. Pandangan mereka terhadap kritik cenderung negatif. Kritik sering dipandang sebagai suatu tindakan yang bisa menyerang wibawa, harga diri, atau pun nama baik. Kritik juga sering dipandang sebagai representasi ketidaksukaan. Kritik merepresentasikan sebuah kebencian, dan lain-lain. Pandangan ini menyebabkan munculnya prasangka negatif terhadap kritik. Akibatnya adalah orang cenderung melakukan perlawanan terhadap kritik. Jika pengamatan ini benar, maka kondisi ini sungguh tidak menguntungkan karena kritik tidak bisa tumbuh secara sehat dan berkembang secara positif. Padahal, kritik sangat dibutuhkan dalam masyarakat mana pun di dunia ini mengingat fungsinya yang sangat penting, yaitu sebagai sarana kontrol sosial.

Penelitian ini bermaksud mengkaji strategi kesantunan kritik dalam masyarakat budaya Jawa dengan subkultur budaya Jawa Mataraman. Tujuan yang hendak dicapai adalah (a) memahami persepsi dan pandangan masyarakat budaya Jawa Mataraman terhadap kritik, (b) memahami strategi kesantunan kritik yang digunakan beserta persebarannya dalam berbagai konteks situasi, dan (c) mengungkapkan intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial serta implikasinya terhadap

upaya pencegahan potensi pelanggaran nilai/norma sosial yang berkembang dalam masyarakat budaya Mataraman.

Menurut hemat penulis, kritik dalam fungsinya sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat budaya Mataraman ini sangat menarik dikaji. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor. Pertama, di satu sisi masyarakat budaya Jawa (termasuk budaya Mataraman) secara kultural sangat menjunjung tinggi prinsip kerukunan dan prinsip hormat (Magnis-Suseno, 1988), tetapi di sisi lain kritik sangat rawan menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, bagaimana masyarakat budaya Jawa (Mataraman) melakukan kritik dengan tetap menjaga prinsip kerukunan dan prinsip hormat merupakan sesuatu yang sangat menarik diamati.

Kedua, dibandingkan dengan masyarakat Jawa Suroboyoan, masyarakat budaya Jawa Mataraman dikenal lebih halus dalam berbahasa (Jawa) dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa dan *unggah-ungguh*. Dalam kaitannya dengan kritik, menarik diamati bagaimana mereka harus mengekspresikan sebuah kritik sesuai dengan *unggah-ungguh* dan nilai-nilai tata krama yang mereka anut. Apakah budaya sungkan dan pekewuh sangat berpengaruh sehingga kritik seringkali harus ditahan, apakah demi *unggah-ungguh* dan menjaga hubungan harmonis kritik kemudian juga terpaksa harus ditahan dan tidak diekspresikan. Permasalahan-permasalahan inilah antara lain yang menjadi pendorong bagi peneliti untuk memahami secara lebih jauh bagaimana kritik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat budaya Jawa Mataraman.

Mengingat kritik dalam masyarakat budaya Mataraman digunakan dalam berbagai ranah yang cukup luas dan kompleks, maka kritik yang dikaji dalam penelitian ini hanya dibatasi pada dua ranah, yaitu ranah perkantoran dengan materi kritik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perkantoran dan ranah kemasyarakatan dengan materi kritik mengenai segala hal yang terjadi di lingkungan kemasyarakatan pada tingkat RT. Selanjutnya, mengingat kritik dalam ranah perkantoran dan kemasyarakatan bisa terjadi dalam berbagai konteks yang cukup luas dan beragam, maka kritik yang dikaji dalam penelitian ini hanya dibatasi

dalam konteks yang ditentukan berdasarkan dua parameter, yaitu *Relative Power* (P) dan *Social Distance* (D) (Brown dan Levinson (1987)). Interaksi dari kedua parameter tersebut akan menghasilkan sejumlah konteks sebagai berikut: (+P+D), (+P-D), (-P-D), (-P+D), (=P+D), dan (=P-D).

Perlu dikemukakan bahwa parameter-parameter di atas mengacu pada karakteristik penerima kritik (PnK). Parameter +P berarti PnK memiliki power lebih tinggi daripada pelaku kritik (PK). Sebaliknya, parameter -P berarti PnK memiliki *power* yang lebih rendah daripada PK. Parameter =P berarti PnK dan PK memiliki power sederajat atau seimbang. Sementara itu, parameter +D berarti PnK dan PK berjarak, memiliki hubungan yang tidak akrab atau bahkan tidak kenal (*stranger*). Parameter -D berarti PnK dan PK memiliki hubungan yang dekat atau akrab. Berbagai konteks situasi sebagaimana yang disebutkan di atas digunakan sebagai pedoman untuk merumuskan *Discourse Completion Task* dan wawancara kepada informan dalam rangka proses pengumpulan data di lapangan.

Terakhir perlu ditegaskan bahwa kritik yang dikaji dalam penelitian ini adalah kritik yang diekspresikan secara lisan dalam sebuah komunikasi yang bersifat *face- to face interaction*. Pelaku kritik dan penerima kritik diandaikan berada dalam satu peristiwa komunikasi atau dialog atau polilog yang berlangsung secara lisan dan bersemuka. Kritik lisan bersemuka ini dipilih karena dalam kritik lisan bersemuka ini berbagai variabel sosiologis seperti *relative power* dan *social distance* di antara pelaku kritik dan penerima kritik cukup mudah dipahami atau ditentukan sehingga hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis data.

Landasan Teori

1. Pengertian Kritik

Sampai sejauh ini, terdapat beberapa ahli yang mencoba memberikan pengertian tentang kritik. Mulac, et.al.(2000: 390), misalnya, mengemukakan bahwa *criticism has been conceptualized as negative evaluation of some aspect of an individual that is communicated by others* (kritik dikonseptualisasikan sebagai evaluasi negatif terhadap seorang individu yang dikemukakan oleh orang lain). Pendapat Mulac, et.al ini senada

dengan pendapat MIN Shang-chao (2008: 75) bahwa kritik berkenaan dengan evaluasi negatif terhadap perilaku seorang individu.

Sementara itu, Hoang Thi Xuan Hoa (2007: 144) menyatakan bahwa *criticizing is sometimes performed to vent the speaker's negative feeling or attitude to the hearer or the hearer's work, choice, behaviour, etc.* (kritik diungkapkan untuk menyatakan perasaan negatif atau sikap negatif penutur terhadap petutur atau terhadap kinerja, pilihan, perilaku petutur, dan sebagainya). Menurutnya, kritik mempunyai dua fungsi utama, yaitu menunjukkan perilaku yang dianggap negatif yang dilakukan petutur dan meminta supaya petutur melakukan perbaikan.

Pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Nguyen (2005: 110) (yang mengadaptasi dari pendapat Wiersbicka (1987)). Dia menjelaskan bahwa kritik dapat didefinisikan sebagai berikut.

A criticism is defined as an illocutionary act whose illocutionary point is to give negative evaluation on H's actions, choice, words, and products for which he or she may be held responsible. This act is performed in hope of influencing H's future actions for the better for his or her own benefits as viewed by S or to communicate S's dissatisfaction/ discontent with or dislike regarding what H has done but without the implicature that H has done brings undesirable consequences to S.

Berdasarkan pengertian kritik yang dikemukakan para ahli di atas, ada dua hal penting yang dapat dicatat. Pertama, kritik selalu berkenaan dengan evaluasi negatif atau perasaan negatif atau sikap negatif terhadap perbuatan dan perilaku petutur. Kedua, kritik dilakukan dengan harapan perbuatan petutur menjadi lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Dua hal ini tampaknya merupakan inti sari dari pengertian kritik. Oleh karena itu, kritik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tindak ilokusi yang poin ilokusinya adalah memberikan evaluasi negatif terhadap tindakan, hal, perbuatan, kata-kata, dan sikap petutur. Evaluasi negatif itu dikemukakan dengan harapan petutur mawas diri, instropeksi diri, dan

kemudian melakukan koreksi diri sehingga perbuatan petutur menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

2. Strategi Kritik: MKV dan MKH

Dalam kaitannya dengan aktivitas kontrol sosial, strategi kritik dalam masyarakat budaya Mataraman dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua macam strategi yang dalam penelitian ini disebut sebagai (1) strategi Melakukan Kritik secara Verbal (strategi MKV) dan (2) strategi Melakukan Kritik dalam Hati (strategi MKH). Yang dimaksud dengan strategi MKV adalah strategi di mana kritik diekspresikan atau diungkapkan secara verbal dengan menggunakan bentuk-bentuk linguistik tertentu dalam konteks tertentu sehingga maksud kritik tersebut dapat dipahami atau dimengerti oleh penerima kritik (PnK). Sementara itu, strategi MKH adalah strategi di mana kritik hanya diungkapkan dalam hati. Artinya, PK bermaksud melakukan kritik kepada PnK, namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu atau kendala-kendala budaya tertentu (misalnya karena sungkan, pakewuh, menghindari konflik, dan lain-lain) maksud kritik tersebut tidak diekspresikan secara verbal, tetapi hanya diungkapkan dalam hati (PK diam saja). Strategi MKV senada dengan strategi *do the FTA* menurut pengertian Brown dan Levinson sementara strategi MKH senada dengan strategi *don't do the FTA*.

Selanjutnya, strategi MKV dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi kritik langsung adalah strategi di mana kritik diungkapkan secara transparan, jelas, eksplisit, dan tidak ambigu. Strategi langsung dimungkinkan apabila maksud penutur (*speaker's meaning*) sama dengan makna linguistik (*linguistic meaning*) atau makna kalimat (*sentence meaning*) (Searle, 1996). Strategi langsung, menurut Blum-kulka, et. al (1989: 18) bisa ditandai oleh indikator-indikator linguistik atau bisa juga ditandai oleh *semantic content*. Strategi langsung, menurut istilah Brown dan Levinson (1987) pada umumnya termasuk strategi *on record*. Kritik langsung bisa juga dilakukan dengan menggunakan verba performatif yang dimunculkan dalam struktur lahir.

Strategi tidak langsung terjadi manakala kritik diungkapkan secara tidak transparan, implisit, atau ambigu. Strategi tidak langsung mengandaikan bahwa penutur menyampaikan maksudnya tidak melalui makna linguistik. Menurut Searle (1987), strategi tidak langsung memiliki dua daya ilokusi, yaitu *secondary illocutionary act* dan *primary illocutionary act*. Yang pertama bersifat literal dan yang kedua bersifat nonliteral. Penutur mengemukakan *primary illocutionary act* melalui *secondary illocutionary act*. Strategi tidak langsung, menurut istilah Brown dan Levinson (1987), termasuk strategi off record. Dilihat dari Prinsip Kerja Sama Grice, strategi tidak langsung melanggar maksim cara, khususnya submaksim "hindari ketidakjelasan dan hindari ambiguitas".

3. Kritik Sebagai Sarana Kontrol Sosial

Kritik dalam penelitian ini dilihat dalam fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Yang dimaksud kontrol sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan tata nilai yang berlaku. Kontrol sosial ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu koersif dan persuasif. Kontrol sosial koersif adalah kontrol sosial yang berupa tindakan yang bersifat represif bisa berupa hukuman, paksaan, atau bahkan tindakan-tindakan fisik yang bersifat kekerasan. Seorang pencuri yang tertangkap tangan dan kemudian dibawa ke pengadilan dan divonis selama dua tahun merupakan bentuk kontrol sosial koersif. Demikian juga, seorang siswa yang disuruh berlari mengelilingi lapangan sebanyak lima kali sebagai hukuman karena tidak mengerjakan PR juga merupakan bentuk kontrol sosial koersif.

Sebaliknya, kontrol sosial persuasif merupakan kontrol sosial yang lebih lunak, menghindari kekerasan fisik, dan biasanya berwujud atau berbentuk tindakan linguistik atau tindakan verbal. Salah satu bentuk kontrol sosial yang bersifat persuasif adalah kritik. Jadi, kritik adalah tindakan linguistik yang bisa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Sebagai bentuk kontrol sosial, kritik berhubungan dengan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan nilai/norma yang dilakukan oleh penutur. Penyimpangan norma yang dimaksud dapat berupa norma agama, norma

kesusilaan, norma kesantunan, atau norma-norma yang lain. Kritik dimaksudkan untuk mengendalikan dan meluruskan keadaan yang sudah terlanjur menyimpang dan diharapkan keadaan yang menyimpang itu bisa pulih kembali menjadi normal. Target dari sebuah kritik adalah adanya perubahan perilaku dari penerima kritik. Perubahan perilaku itu tercermin dari respon positif terhadap kritik yang bisa berupa jawaban "ya" atau ucapan terima kasih.

Metode Penelitian

1. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Masyarakat yang menjadi sasaran penelitian ini adalah masyarakat budaya Jawa Mataraman yang berpusat di Solo dan Yogyakarta. Wilayah Solo dan Yogyakarta dikenal sebagai wilayah sentra budaya Jawa dan menjadi acuan berbagai wilayah Jawa lainnya. Masyarakat budaya Mataraman dikenal lebih halus, santun, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan juga lebih halus. Hal ini berbeda dengan masyarakat Jawa lainnya, misalnya masyarakat budaya Arek di Jawa Timur yang dikenal terbuka, egaliter, solidaritas, bersahaja, dan sebagainya. Bahasa Jawa yang digunakan juga lebih kasar. Karakteristik masyarakat budaya Jawa Mataraman yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya Jawa tersebut diprediksi akan memperlihatkan warna yang khas pula berkenaan dengan perilaku kritik mereka.

2. Strategi dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni memerikan secara rinci dan mendalam strategi kesantunan kritik dalam masyarakat budaya Jawa Mataraman dewasa ini. Strategi penelitian kualitatif ini digunakan karena yang ditekankan dalam penelitian ini adalah deskripsi proses tentang mengapa dan bagaimana tindak tutur kritik itu diekspresikan, yang mengarah pada pemahaman tentang makna. Penelitian ini dapat dikatakan termasuk jenis penelitian etnografi karena yang dikaji adalah kritik dalam konteks masyarakat budaya Jawa Mataraman. Di samping itu, penelitian ini termasuk kategori

penelitian dasar karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang tindak tutur kritik dalam masyarakat budaya Jawa Mataraman, yang cenderung mengarah pada manfaat yang bersifat teoretis.

Semua penelitian kualitatif pada dasarnya berbentuk studi kasus. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif selalu bersifat kontekstual dan tidak pernah ada upaya atau pemikiran untuk melakukan generalisasi (Sutopo, 2006: 136). Berdasarkan kerangka berpikir itu, maka bentuk penelitian ini pun termasuk studi kasus. Selanjutnya, penelitian yang berbentuk studi kasus ini dapat dilakukan secara terpancang, dapat pula dilakukan secara tidak terpancang. Penelitian ini termasuk kategori studi kasus yang bersifat terpancang karena penelitian ini sudah memiliki arah dan fokus tertentu yang jelas yang dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian. Berikutnya, studi kasus dapat juga dibedakan menjadi studi kasus tunggal dan studi kasus ganda. Penelitian ini termasuk studi kasus tunggal karena masyarakat Jawa yang menjadi sasaran penelitian ini secara sosio-kultural memiliki karakteristik yang relatif homogen, yakni masyarakat Jawa dengan subkultur budaya Mataraman.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Ada beberapa jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Pertama, data itu berupa pandangan masyarakat budaya Jawa Mataraman tentang kritik. Pandangan yang dimaksud bisa berupa pandangan yang positif (kritik dipandang mempunyai manfaat, yaitu untuk mendorong seseorang melakukan introspeksi diri dan koreksi diri) atau pandangan yang negatif (kritik dipandang sebagai tindakan untuk mengekspresikan ketidaksukaan, mencemarkan nama baik, menjatuhkan harga diri, dan lain-lain). Kedua, data itu berupa penggunaan strategi-strategi kritik (MKV dan MKH) dalam berbagai konteks situasi. Ketiga, data itu berupa persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH dalam berbagai konteks situasi untuk memahami intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat budaya Jawa Mataraman. Semua jenis data yang dibutuhkan itu diperoleh atau bersumber dari informan

yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana nanti dijelaskan di bawah.

4. Sampling

Sampling berkaitan dengan pemilihan dan pembatasan jumlah serta jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, tetapi dimaksudkan untuk mewakili informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informasi yang lengkap dan mendalam tidak harus digali dari informan yang jumlahnya banyak. Informan yang jumlahnya terbatas pun sangat dimungkinkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan mendalam. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam penelitian kualitatif adalah kelengkapan dan kedalaman informasinya, bukan jumlah informannya (Sutopo, 2006).

Karena yang dipentingkan adalah kedalaman dan kelengkapan informasi, maka tidak semua anggota masyarakat budaya Jawa Mataraman berpeluang menjadi informan. Anggota masyarakat budaya Jawa Mataraman yang berpeluang menjadi informan hanyalah anggota masyarakat yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu (kriteria informan dijelaskan di bawah). Informan yang memenuhi syarat diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dengan tingkat kedalaman yang betul-betul dibutuhkan oleh peneliti. Dalam kaitan ini, informan yang memenuhi syarat bisa jadi cukup banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai tempat di wilayah budaya Mataraman, akan tetapi tidak mungkin semuanya dijadikan informan. Oleh karena itu, informan yang memenuhi syarat itu dipilih lagi secara terbatas yang berjumlah sekitar 33 informan dan pemilihan itu dilakukan secara purposif dengan memperhatikan keterwakilan wilayah. Berbagai informasi yang digali dari informan yang telah diseleksi itu diharapkan dapat mewakili informasi dari masyarakat budaya Jawa Mataraman yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode elisitasi. Metode elisitasi dapat dibedakan menjadi dua subkategori, (a) interview dan (b) Discourse Completion Tasks (DCT, Tugas Melengkapi Wacana). Interview biasanya dilakukan kepada sejumlah informan yang ditentukan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian. Interview bisa dilakukan secara individual, tetapi bisa juga dilakukan secara berkelompok dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). DCT merupakan cara lain untuk mengelisisasi data. DCT mempunyai dua versi. Pertama, DCT dirumuskan dalam bentuk dialog pendek yang disertai dengan slot kosong. Slot kosong inilah yang kemudian harus diisi oleh informan dengan tindak tutur tertentu dan oleh peneliti kemudian dijadikan sebagai data penelitian. Kedua, DCT tidak berisi dialog pendek, tetapi berisi deskripsi tentang situasi tertentu (Rintell dan Mitchell, 1989: 251).. Dalam hal ini informan diminta membayangkan berperan sebagai penutur dengan kedudukan tertentu, status sosial tertentu, atau power tertentu (role play) dan memiliki social distance tertentu dalam kaitannya dengan petutur sesuai dengan yang digambarkan dalam deskripsi situasi dalam DCT. Informan betul-betul diminta menghayati peran yang dimainkannya, seolah-olah itu adalah kejadian nyata dan kemudian informan diminta melakukan tindak tutur tertentu sesuai dengan peran yang dimainkan. Tindak tutur inilah yang kemudian oleh peneliti dijadikan sebagai data penelitian.

Menurut Senft (1995: 578), dalam penelitian yang ingin menginvestigasi realisasi pola tindak tutur, metode elisitasi dengan menggunakan DCT sangat cocok digunakan. Metode ini pernah juga digunakan oleh Blum-Kulka dalam melakukan penelitian mengenai *Requests and Apologies* secara lintas kultural dalam beberapa negara. Karena penelitian yang dilaksanakan ini juga mengenai realisasi tindak tutur (kritik dan respon terhadap kritik), maka metode elisitasi ini pun digunakan dalam penelitian ini. Akan tetapi, elisitasi yang dimaksud tidak hanya dilakukan melalui DCT, tetapi juga melalui interview lisan dengan informan.

Untuk menjaga validitas data, informan yang diinterview atau pun yang diminta untuk mengisi DCT tidak dipilih secara acak, tetapi ditentukan dengan persyaratan khusus, yaitu (a) informan adalah anggota masyarakat budaya Jawa Mataraman, (b) memiliki wawasan yang luas tentang nilai-nilai budaya Jawa Mataraman, (c) tidak pernah bertempat tinggal di luar wilayah budaya Mataraman selama tiga tahun berturut-turut, (d) aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan, (e) bersedia menjadi informan dan (f) memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan wawancara. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan data yang terjaring betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

DCT dibuat dan dibagikan kepada informan untuk mendapatkan pengisian. DCT dirumuskan dalam bentuk deskripsi situasi, bukan dialog, sesuai dengan yang dimodifikasi oleh Rintell dan Mitchell (1989). Deskripsi situasi itu diakhiri dengan pertanyaan sesuai dengan kepentingan penelitian. Variabel penting yang dipertimbangkan dalam membuat deskripsi situasi adalah \pm Power (S-H), \pm Social Distance (S-H), dan \pm Publik. Interaksi di antara ketiga variabel ini akan membentuk sejumlah konteks situasi yang semuanya harus jelas tetgambar dalam DCT.

6. Metode Analisis Data

Sebagaimana dijelaskan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses analisis dilakukan secara induktif. Data yang berhasil dikumpulkan di lapangan tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, tetapi digunakan sebagai bahan atau dasar pemahaman di dalam menyusun simpulan atau teori (Sutopo, 1996: 106; Moleong, 2010: 10). Analisis induktif sangat menekankan pentingnya apa yang sebenarnya terjadi dan ditemukan di lapangan yang pada dasarnya bersifat khusus berdasarkan karakteristik konteksnya dalam kondisi alamiahnya. Analisis induktif bersifat interaktif dan siklus, serta proses analisis sudah dimulai sejak pengumpulan data di lapangan (Sutopo, 2006: 106).

Aktivitas analisis data dalam penelitian ini mengikuti Miles dan Huberman (1984), yaitu data reduction (reduksi data), data display (sajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan simpulan/verifikasi).

Ketiga aktivitas analisis tersebut dilakukan secara interaktif. Begitu peneliti melakukan proses pengumpulan data di lapangan, data reduktion atau reduksi data segera dibuat, dan diteruskan dengan pengembangan bentuk susunan sajian data (*data display*) yang bersifat sementara. Dari sajian data itu, peneliti kemudian mengusahakan pikiran yang mengarah pada simpulan. Simpulan ini tentu saja masih bersifat sementara karena proses pengumpulan data masih tetap berlangsung. Begitu peneliti mendapatkan data baru dengan pemahaman baru, kemungkinan besar simpulan sementara tersebut perlu diubah. Akan tetapi, bila ternyata data baru tersebut lebih memperkuat simpulan, maka simpulan sementara yang telah dikembangkan akan menjadi semakin mantap. Demikian seterusnya perjalanan proses pengumpulan data dan analisisnya (*reduksi data, display data, dan simpulan/verifikasi*) berjalan bersamaan sampai data yang dibutuhkan betul-betul dirasakan lengkap (*jenuh*) sehingga pengumpulan data dapat diakhiri yang kemudian dapat dilakukan analisis akhir untuk mendapatkan simpulan final.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Budaya Mataraman terhadap Kritik

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam masyarakat budaya Mataraman tampaknya terdapat tiga tipe kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan pandangan dan persepsi mereka terhadap kritik. Pertama adalah tipe masyarakat yang mempunyai pandangan dan persepsi yang positif terhadap kritik, namun umumnya tidak siap menghadapi kritik. Dalam masyarakat tipe pertama ini kritik tidak dipandang sebagai tindakan untuk menjatuhkan harga diri atau menyerang kelemahan penerima kritik. Kritik juga tidak dipandang sebagai representasi ketidaksukaan atau kebencian. Kritik justru dipandang sebagai tindakan yang bisa membawa manfaat, yaitu mendorong penerima kritik untuk melakukan introspeksi diri dan koreksi diri. Kendatipun demikian, kelompok masyarakat tipe pertama ini pada umumnya tetap saja tidak suka dikritik dan cenderung membela diri ketika dikritik, bukan karena merasa diserang atau tidak disukai, tetapi merasa tidak siap mental menghadapi kritik. Sebagaimana dipahami, meskipun

kritik bisa membawa manfaat bagi penerima kritik, namun kritik seringkali bisa mengancam muka penerima kritik, apalagi kritik itu dikemukakan di hadapan public. Oleh karena itu, untuk bisa menerima kritik dengan baik betul-betul diperlukan kesiapan mental. Kelompok masyarakat tipe pertama ini tampaknya merasa terancam mukanya meskipun mereka menyadari bahwa kritik itu bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, meskipun kelompok ini mempunyai pandangan yang positif terhadap kritik, namun faktanya mereka cenderung tidak welcome terhadap kritik. Kelompok yang berpandangan seperti ini tampaknya merupakan kelompok yang paling umum dalam masyarakat budaya Mataraman.

Tipe kedua adalah tipe masyarakat yang berpandangan positif terhadap kritik dan lebih siap mental menghadapi kritik. Tampaknya tipe masyarakat kelompok kedua ini lebih memandang kritik dari sisi manfaatnya daripada sisi keterancaman mukanya. Oleh karena itu, tipe masyarakat kelompok kedua ini pada umumnya memberikan respon yang positif terhadap kritik dan tidak serta-merta membela diri, apalagi melakukan perlawanan terhadap kritik. Dengan kata lain, tipe masyarakat kelompok ini sangat welcome terhadap kritik. Akan tetapi, kelompok masyarakat yang berpandangan seperti masyarakat tipe kedua ini dalam masyarakat budaya Mataraman tampaknya tidak seumum pandangan kelompok masyarakat yang pertama.

Kelompok masyarakat tipe ketiga adalah kelompok masyarakat yang cenderung berpandangan negatif terhadap kritik. Pelaku kritik pada umumnya dinilai mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang cenderung merugikan penerima kritik. Menurut kelompok ini, kritik itu pada umumnya dimaksudkan untuk menyerang harga diri atau wibawa orang yang dikritik, atau sebagai ekspresi rasa tidak suka terhadap penerima kritik. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, wajar apabila seseorang itu membela diri ketika dikritik dan melakukan perlawanan terhadap kritik. Oleh karena itu, kelompok masyarakat tipe ketiga ini sangat tidak welcome terhadap kritik. Dalam masyarakat budaya Mataraman kelompok masyarakat yang cenderung memberikan stigma negative terhadap kritik ini tampaknya juga tidak seumum kelompok masyarakat yang pertama.

Berdasarkan ketiga tipe masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik dalam masyarakat budaya Mataraman secara umum dipandang sebagai tindakan linguistic yang rawan mengancam muka atau bahkan bisa mengganggu hubungan harmonis dan kerukunan sosial. Kelompok masyarakat tipe pertama yang meskipun menyadari bahwa kritik bisa membawa manfaat bagi dirinya, namun faktanya mereka sering tidak siap mental ketika dikritik. Mereka lebih melihat kritik dari sisi keterancaman mukanya daripada sisi manfaatnya. Oleh karena itu, mereka sering merasa sensitive dan tidak siap mental mendapat kritik. Respon yang diberikan sering berupa pembelaan diri sekedar untuk melindungi citra atau mukanya sendiri meskipun pada akhirnya mereka melakukan introspeksi diri. Sementara kelompok masyarakat tipe ketiga justru terang-terangan memberikan stigma negative terhadap kritik bahwa kritik sering dimaksudkan untuk menyerang penerima kritik atau sebagai ekspresi rasa tidak suka terhadap penerima kritik. Oleh karena itu, respon yang diberikan sering berupa serangan balik terhadap pelaku kritik sehingga konflik sangat rawan terjadi. Hanya kelompok masyarakat tipe kedua yang memandang positif terhadap kritik dan memberikan respon yang positif terhadap kritik dan tidak serta merta membela diri ketika dikritik. Fakta ini membuktikan bahwa kritik dalam masyarakat budaya Mataraman secara umum rawan mengancam muka. Dengan kata lain, kritik dalam masyarakat budaya Mataraman cukup sensitive. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kritik bisa mengganggu kerukunan social atau bahkan menimbulkan konflik di antara pelaku kritik dan penerima kritik.

Jika dicermati dengan baik, tampaknya ada dua factor yang menyebabkan mengapa kritik sangat sensitive dalam masyarakat budaya Mataraman. Pertama, berkenaan dengan pemahaman dan pengertian mereka tentang kritik yang sering rancu dan tumpang tindih dengan tindakan-tindakan linguistic lain seperti menghina, memaki, atau menghujat. Padahal, sebagaimana dipahami, mengkritik bukanlah menghina dan menghina bukanlah mengkritik. Kerancuan pemahaman itu menyebabkan kritik selalu dibayangkan sebagai suatu tindakan yang keras dan mempermalukan. Kedua, berkenaan dengan kurangnya pemahaman mereka tentang berbagai macam strategi kritik, yaitu bahwa kritik bisa

dilakukan dengan menggunakan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Tampaknya kritik yang dipahami oleh mereka lebih banyak berkenaan dengan strategi kritik langsung (*bold on record*) yang memang rawan mengancam muka.

2. Strategi Kritik dan Persebaran Penggunaannya dalam Masyarakat Budaya Mataraman

2.1. Strategi Kritik: MKV dan MKH

Sebagaimana dipahami, tindak tutur kritik selalu diungkapkan dengan menggunakan strategi-strategi kesantunan tertentu sesuai dengan konteks yang tersedia. Berdasarkan konteks yang tersedia ini, pelaku kritik kemudian memilih strategi kesantunan kritik tertentu yang dianggap cocok atau sesuai dengan konteks tersebut. Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, strategi kritik dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis strategi, yaitu (1) strategi Melakukan Kritik secara Verbal (strategi MKV) dan (2) strategi Melakukan Kritik dalam Hati (strategi MKH). Berdasarkan data yang ditemukan, kedua jenis strategi ini digunakan secara komplementer dalam masyarakat budaya Mataraman. Maksudnya, dalam konteks tertentu strategi MKV yang cenderung lebih sering digunakan, tetapi dalam konteks tertentu yang lain justru strategi MKH yang cenderung lebih lazim digunakan. Dengan kata lain, strategi MKV dan MKH dalam masyarakat budaya Mataraman memperlihatkan persebaran penggunaan yang tidak sama. Persebaran itu sepenuhnya ditentukan oleh konteks yang tersedia. Pada seksi 4.3.2 berikut ini dipaparkan bagaimana persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH dalam berbagai konteks situasi, baik di dalam ranah perkantoran maupun ranah kemasyarakatan. Pemahaman mengenai persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH ini sangat bermanfaat, khususnya untuk memahami sejauh mana intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat budaya Mataraman, khususnya dalam ranah perkantoran dan ranah kemasyarakatan.

2.2. Persebaran Strategi MKV dan MKH dalam Ranah Perkantoran dan Kemasyarakatan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH dalam ranah perkantoran dan ranah kemasyarakatan secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel 1 berikut. Persebaran ditentukan berdasarkan pilihan informan yang berjumlah 33 orang dalam berbagai konteks situasi yang ditentukan berdasarkan parameter (\pm Power) dan (\pm Distance).

Tabel 1
Persebaran Penggunaan
Strategi MKV dan MKH dalam Ranah Perkantoran dan Kemasyarakatan
dalam Masyarakat Budaya Mataraman

NO	Ranah dan Jenis Strategi Konteks	Perkantoran		Kemasyarakatan	
		MKH	MKV	MKH	MKV
1	+P+D	15	18	3	30
2	+P-D	6	27	4	29
3	-P+D	3	30	5	28
4	-P-D	2	31	1	32
5	=P+D	4	29	2	31
6	=P-D	2	31	4	29

Persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH di atas sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana intensitas kritik sebagai sarana control social dalam masyarakat budaya mataraman, khususnya dalam ranah perkantoran dan ranah kemasyarakatan. Dengan kata lain, persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH ini menjadi dasar untuk

menentukan intensitas control social sebagaimana diuraikan pada seksi 5.3 berikut.

3. Intensitas Kritik sebagai Sarana Kontrol Sosial dalam Ranah Perkantoran dan Kemasyarakatan (RT)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kritik dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan bertutur yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial. Melakukan kritik tidak sekedar mengekspresikan sikap negatif terhadap perilaku seseorang. Lebih dari itu, melakukan kritik berarti juga melakukan kontrol. Melakukan kontrol berarti berusaha mencegah terjadinya pelanggaran nilai atau norma-norma tertentu atau mengembalikan perilaku yang menyimpang ke dalam perilaku yang normal sesuai dengan norma yang berlaku. Melakukan kritik dapat berarti juga mendesak atau mendorong agar penerima kritik melakukan introspeksi diri dan koreksi diri.

Sejauh mana kritik ini dalam masyarakat budaya Mataraman bisa menjalankan tugasnya sebagai sarana kontrol sosial sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat budaya Mataraman memberdayakan penggunaan strategi MKV dan MKH dalam berbagai konteks situasi. Dalam hal ini wujud konkret dari sebuah kontrol adalah ketika digunakannya strategi MKV. Oleh karena itu, semakin banyak strategi ini digunakan dalam berbagai konteks situasi, semakin tinggi juga intensitas kontrol sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya, penggunaan strategi MKH justru cenderung menggambarkan tumpulnya sebuah kontrol. Oleh karena itu, semakin banyak strategi ini digunakan dalam berbagai konteks situasi, semakin rendah juga intensitas kontrol sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa untuk memahami intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat budaya Mataraman, tabel 3 di atas harus menjadi acuan. Mengapa demikian, karena tabel 3 di atas menggambarkan secara rinci bagaimana persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH dalam berbagai konteks situasi (konteks 1 sampai dengan konteks (6), baik dalam ranah perkantoran maupun dalam ranah kemasyarakatan.

Jika tabel 3 di atas disimak lagi, kita akan mempunyai tiga komponen penting yang perlu diperhatikan. Ketiga komponen tersebut adalah (a) jenis konteks, (b) jenis strategi, dan (c) ranah. Intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam hal ini dapat dipahami dengan mengaitkan ketiga komponen tersebut satu sama lain dengan cara menghitung jumlah atau nilai penggunaan strategi MKV dan MKH pada tiap-tiap ranah dan pada tiap-tiap jenis konteks. Misalnya, dalam konteks A strategi MKV mendapat nilai 30 dalam ranah perkantoran, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 3. Hal ini berarti bahwa intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam konteks A dalam ranah perkantoran sangat tinggi. Dengan cara seperti inilah intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial dalam penelitian ini ditentukan. Sebagaimana nanti akan kita lihat, tinggi-rendahnya intensitas kontrol sosial ini akan mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pencegahan potensi terjadinya pelanggaran norma atau nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagaimana dapat disimak pada tabel 3 di atas, Strategi MKV dalam konteks (+P+D) dalam ranah perkantoran mendapat nilai 18, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 15. Hal ini dapat dimaknai bahwa intensitas kritik dalam konteks (+P+D) dalam ranah perkantoran tidak terlalu tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman. Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, strategi MKV dalam konteks (+P+D) mendapat nilai 30, sedangkan strategi MKH dalam konteks dan ranah yang sama mendapat nilai 3. Hal ini dapat disimpulkan bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (+P-D) dalam ranah kemasyarakatan sangat tinggi dan jauh lebih tinggi daripada kontrol sosial yang terjadi dalam ranah perkantoran.

Selanjutnya, dalam konteks (+P-D) strategi MKV dalam ranah perkantoran mendapat nilai 27, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 6. Hal ini berarti bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (+P-D) dalam ranah perkantoran cukup tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman. Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, strategi MKV dalam konteks (+P-D) mendapat nilai 29, sedangkan strategi MKH dalam konteks dan

ranah yang sama mendapat nilai 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (+P-D) dalam ranah kemasyarakatan juga sangat tinggi.

Dalam konteks (-P+D) strategi MKV dalam ranah perkantoran mendapat nilai 30, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 3. Hal ini berarti bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (-P+D) dalam ranah perkantoran sangat tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman. Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, strategi MKV dalam konteks (-P+D) mendapat nilai 28, sedangkan strategi MKH dalam konteks dan ranah yang sama hanya mendapat nilai 5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (+P-D) dalam ranah kemasyarakatan juga cukup tinggi.

Dalam konteks (-P-D) strategi MKV dalam ranah perkantoran mendapat nilai 31, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 2. Hal ini berarti bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (-P-D) dalam ranah perkantoran sangat tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman. Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, strategi MKV dalam konteks (-P-D) mendapat nilai 32, sedangkan strategi MKH dalam konteks dan ranah yang sama hanya mendapat nilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (-P-D) dalam ranah kemasyarakatan juga sangat tinggi.

Dalam konteks (=P+D) strategi MKV dalam ranah perkantoran mendapat nilai 29, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 4. Hal ini berarti bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (=P+D) dalam ranah perkantoran cukup tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman. Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, strategi MKV dalam konteks (=P+D) mendapat nilai 31, sedangkan strategi MKH dalam konteks dan ranah yang sama mendapat nilai 2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (=P+D) dalam ranah kemasyarakatan juga sangat tinggi.

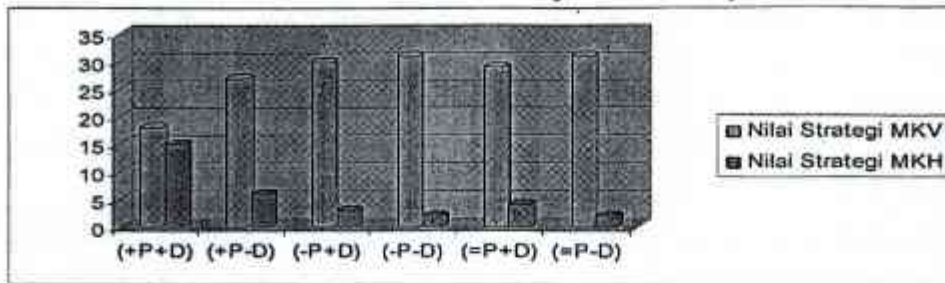
Dalam konteks (=P-D) strategi MKV dalam ranah perkantoran mendapat nilai 31, sedangkan strategi MKH dalam konteks yang sama dan ranah yang sama mendapatkan nilai 2. Hal ini berarti bahwa intensitas

kontrol sosial dalam konteks (+P+D) dalam ranah perkantoran cukup tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman. Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, strategi MKV dalam konteks (=P-D) mendapat nilai 29, sedangkan strategi MKH dalam konteks dan ranah yang sama tidak mendapat nilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas kontrol sosial dalam konteks (+P-D) dalam ranah kemasyarakatan juga sangat tinggi dalam masyarakat budaya Mataraman.

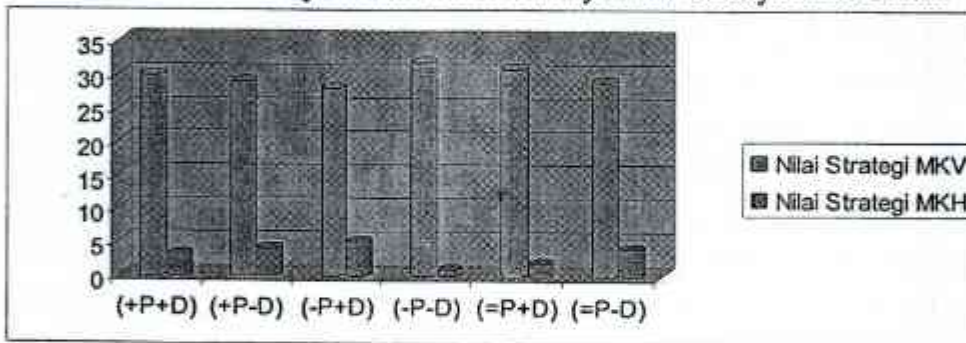
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi MKV dalam ranah perkantoran rata-rata memiliki nilai penggunaan yang sangat tinggi, kecuali dalam konteks (+P+D). Sebaliknya, strategi MKH memiliki nilai penggunaan yang rata-rata rendah kecuali juga dalam konteks (+P+D) dalam ranah perkantoran. Data ini tampaknya bisa menjadi dasar yang cukup kuat untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam ranah kemasyarakatan, intensitas aktivitas kontrol sosial dalam masyarakat budaya Mataraman pada umumnya cukup tinggi dalam berbagai konteks situasi. Sementara itu, dalam ranah perkantoran intensitas kontrol sosial itu juga sangat tinggi apabila kedudukan sosial atau power penerima kritik sederajat atau lebih rendah daripada pelaku kritik, baik dalam hubungan yang berjarak maupun akrab. Akan tetapi, bila kedudukan atau power penerima kritik itu lebih tinggi daripada pelaku kritik, maka intensitas kontrol sosial itu tidak begitu tinggi karena kebanyakan pelaku kritik justru lebih memilih strategi MKH daripada MKV.

Jika dicermati lagi secara lebih detail, kendatipun intensitas kontrol sosial dalam masyarakat budaya Mataraman secara umum cukup tinggi (kecuali dalam konteks +P+D dalam ranah perkantoran), namun tampaknya intensitas tersebut pada tiap-tiap jenis konteks dan ranah mempunyai derajat yang tidak sama. Dalam konteks tertentu, ada intensitas kritik yang gradasinya lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Grafik berikut ini menjelaskan gradasi intensitas kritik sebagai sarana kontrol sosial yang terjadi dalam masyarakat budaya Mataraman. Grafik 1 menjelaskan gradasi dalam ranah perkantoran, sedangkan grafik 2 menjelaskan gradasi dalam ranah kemasyarakatan. Gradasi ditentukan berdasarkan konteks-konteks seperti yang disebutkan di atas.

Grafik 1
Gradasi Intensitas Kritik
dalam Ranah Perkantoran dalam Masyarakat Budaya Mataraman



Grafik 2
Gradasi Intensitas Kritik
dalam Ranah Kemasyarakatan dalam Masyarakat Budaya Mataraman



Dalam grafik 1 di atas terlihat bahwa dalam ranah perkantoran, tingkat kontrol sosial yang paling tinggi terjadi dalam konteks (-P-D) dan (=P-D). Berikutnya terjadi dalam konteks (-P+D) dan (=P+D). Urutan berikutnya terjadi dalam konteks (+P-D), dan urutan yang paling bawah terjadi dalam konteks (+P+D). Jika dicermati secara lebih ditail, ternyata yang cenderung menentukan gradasi itu adalah faktor power. Jika fiturnya adalah (-P), maka intensitas kontrol itu paling tinggi, tidak masalah apakah berkombinasi dengan fitur (+D) atau pun (-D). Jika fiturnya adalah (=P), apakah berkombinasi dengan (+D) atau pun (-D) maka intensitas kontrol itu masih tetap tinggi. Jika fiturnya adalah (+P), maka intensitas kontrol itu cenderung turun dan yang paling rendah intensitas kontrol sosialnya adalah terjadi dalam konteks (+P) yang berkombinasi dengan (+D). Hal itu

menunjukkan bahwa yang cenderung menentukan gradasi itu adalah ($\pm P$) bukan ($\pm D$). Meskipun demikian, perbedaan gradasi itu tidak terlalu signifikan karena perbedaannya hanya tipis, kecuali yang mengandung fitur ($+P$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat budaya Mataraman intensitas kontrol sosial dalam ranah perkantoran cenderung tinggi jika terjadi dalam konteks yang mengandung fitur ($-P$) atau ($=P$). Akan tetapi, jika konteks itu mengandung fitur ($+P$), apalagi berkombinasi dengan fitur ($+D$), maka intensitas kontrol sosial itu cenderung rendah.

Sementara itu, grafik 2 memperlihatkan bahwa dalam ranah kemasyarakatan, tingkat kontrol sosial yang paling tinggi terjadi dalam konteks ($-P-D$). Berikutnya berturut-turut terjadi dalam konteks ($=P+D$), ($+P+D$), ($+P-D$) dan ($=P-D$), serta ($-P+D$). Tidak seperti dalam ranah perkantoran, dalam ranah kemasyarakatan, ternyata tidak ada satu fitur yang secara dominan menentukan gradasi. Hal ini tampak dari fakta bahwa perbedaan gradasi itu sangat tidak signifikan untuk semua jenis konteks, baik yang mengandung fitur ($+P$), ($-P$) maupun yang mengandung fitur ($+D$) atau ($-D$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat budaya Mataraman intensitas kontrol sosial dalam ranah kemasyarakatan cukup tinggi pada semua jenis konteks.

Intensitas aktivitas kontrol sosial dalam masyarakat budaya Mataraman sebagaimana tampak dalam grafik 1 dan 2 di atas tentu membawa implikasi yang cukup penting terhadap upaya pencegahan potensi pelanggaran nilai. Dalam ranah kemasyarakatan, karena intensitas kontrol sosialnya cukup tinggi dalam semua jenis konteks dan situasi dan hal ini berarti kritik bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka implikasinya adalah manakala terjadi sebuah pelanggaran nilai, pelanggaran nilai tersebut cenderung akan bisa segera dicegah dan dikontrol serta tidak dibiarkan berlarut-larut atau dibiarkan berlangsung terus tanpa ada koreksi.

Sebaliknya, dalam ranah perkantoran pelanggaran nilai yang terjadi itu justru mempunyai potensi untuk dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dicegah, terutama dalam konteks yang mengandung fitur ($+P$), lebih-lebih yang berkombinasi dengan fitur ($+D$). Akan tetapi, bila konteks

yang dimaksud tidak mengandung fitur (+P), tetapi hanya mengandung fitur (-P), (=P), (+D), atau (-D), intensitas kontrol sosial dalam ranah perkantoran ini umumnya masih tetap tinggi. Dalam hal ini kritik masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga pelanggaran nilai yang terjadi bisa segera dicegah dan dikontrol.

Berkenaan dengan uraian di atas, pertanyaan yang menarik dijawab adalah mengapa intensitas kritik (kontrol) dalam konteks yang mengandung fitur (+P) dalam ranah perkantoran cenderung rendah, padahal dalam ranah kemasyarakatan intensitas kritik itu cenderung tinggi meskipun konteks yang membalutnya mengandung fitur (+P)? Tampaknya, ada dua faktor yang menyebabkannya, yaitu (a) adanya rasa sungkan/rasa pekewuh dengan atasan/pimpinan dan (b) adanya rasa khawatir atasan/pimpinan yang dikritik itu merasa tidak berkenan atau tersinggung. Kedua faktor inilah yang tampaknya sangat berpengaruh mengapa mereka lebih memilih strategi MKH daripada MKV. Jika pemilihan strategi MKH itu semata-mata karena faktor sungkan atau pekewuh, maka hal itu cenderung berkaitan dengan nilai kepantasan yang dianut pelaku kritik. Akan tetapi, jika pemilihan strategi MKH itu karena adanya rasa khawatir penerima kritik tersinggung, maka pemilihan strategi MKH itu justru mencerminkan adanya keterpaksaan dari pelaku kritik. Dikatakan terpaksa karena pelaku kritik pasti sudah menghitung dengan cermat manakala dia menggunakan strategi MKV dalam melakukan eksekusi kritik kemungkinan besar penerima kritik pasti akan merasa tidak berkenan sehingga justru rawan menimbulkan konflik. Sebagai bawahan, pelaku kritik pasti tidak menginginkan terjadinya konflik dengan atasan sebab konflik itu justru seringkali menjadi pemicu dan pendorong terjadinya penyalahgunaan *coersive power* atas dirinya, selaku bawahan. Kondisi seperti itu pasti sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dan tetap menjaga hubungan harmonis dengan atasan, seorang bawahan di dalam sebuah kantor seringkali terpaksa harus memilih menggunakan strategi MKH dalam melakukan eksekusi kritik alih-alih strategi MKV. Akibatnya adalah kritik tentu tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga penyimpangan yang

terjadi itu cenderung akan berlangsung terus dan berlarut-larut, bahkan terbiarkan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut.

- (1) Masyarakat budaya Mataraman secara umum sangat sensitive terhadap kritik. Kritik sering dipandang sebagai tindakan yang rawan mengancam muka atau bahkan bisa mengganggu kerukunan sosial. Kritik lebih dilihat dari sisi keterancaman mukanya daripada sisi manfaatnya. Oleh karena itu, kritik dalam masyarakat budaya Mataraman harus dikemukakan dengan strategi kesantunan yang tepat, sesuai dengan nilai-nilai sosiokultural yang dianutnya.
- (2) Tampaknya ada dua faktor yang menyebabkan mengapa kritik sangat sensitive dalam masyarakat budaya Mataraman. Pertama, berkenaan dengan pemahaman dan pengertian mereka tentang kritik yang sering rancu dan tumpang tindih dengan tindakan-tindakan linguistik lain seperti menghina, memaki, atau menghujat. Padahal, sebagaimana dipahami, mengkritik bukanlah menghina dan menghina bukanlah mengkritik. Kerancuan pemahaman itu menyebabkan kritik selalu dibayangkan sebagai suatu tindakan yang keras dan mempermalukan. Kedua, berkenaan dengan kurangnya pemahaman mereka tentang berbagai macam strategi kritik, yaitu bahwa kritik bisa dilakukan dengan menggunakan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Tampaknya kritik yang dipahami oleh mereka lebih banyak berkenaan dengan strategi kritik langsung (*bald on record*) yang memang rawan mengancam muka.
- (3) Berdasarkan persebaran penggunaan strategi MKV dan MKH, intensitas kritik yang paling tinggi dalam ranah perkantoran terjadi dalam konteks (-P-D) dan (=P-D). Berikutnya terjadi dalam konteks (-P+D) dan (=P+D). Urutan berikutnya terjadi dalam konteks (+P-D), dan urutan yang paling bawah terjadi dalam konteks (+P+D). Dalam hal ini yang cenderung menentukan intensitas tersebut

adalah faktor power. Jika fiturnya adalah (-P), maka intensitas kontrol itu paling tinggi, tidak masalah apakah berkombinasi dengan fitur (+D) atau pun (-D). Jika fiturnya adalah (=P), apakah berkombinasi dengan (+D) atau pun (-D) maka intensitas kontrol itu masih tetap tinggi. Jika fiturnya adalah (+P), maka intensitas kontrol itu cenderung turun dan yang paling rendah intensitas kontrol sosialnya adalah terjadi dalam konteks (+P) yang berkombinasi dengan (+D). Meskipun demikian, perbedaan intensitas itu tidak terlalu signifikan karena perbedaannya hanya tipis, kecuali yang mengandung fitur (+P). Dengan demikian, dalam masyarakat budaya Mataraman intensitas kritik dalam ranah perkantoran cenderung tinggi jika terjadi dalam konteks yang mengandung fitur (-P) atau (=P). Akan tetapi, jika konteks itu mengandung fitur (+P), apalagi berkombinasi dengan fitur (+D), maka intensitas kritik itu cenderung rendah. Ada dua faktor yang menyebabkannya, yaitu (a) adanya rasa sungkan/rasa pekewuh dengan atasan/pimpinan dan (b) adanya rasa khawatir hubungan harmonis dengan atasan/pimpinan menjadi terganggu. Hal ini berarti bahwa pelanggaran nilai yang terjadi dalam konteks ini dalam ranah perkantoran mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dicegah. Kendatipun demikian, bila konteks yang dimaksud tidak mengandung fitur (+P), tetapi hanya mengandung fitur (-P), (=P), (+D), atau (-D), intensitas kritik dalam ranah perkantoran ini umumnya masih tetap tinggi. Dalam hal ini kritik masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga pelanggaran nilai yang terjadi bisa segera dicegah dan dikontrol.

- (4) Dalam ranah kemasyarakatan, intensitas kontrol sosial yang paling tinggi terjadi dalam konteks (-P-D). Berikutnya berturut-turut terjadi dalam konteks (=P+D), (+P+D), (+P-D) dan (=P-D), serta (-P+D). Tidak seperti dalam ranah perkantoran, dalam ranah kemasyarakatan, tidak ada satu fitur yang secara dominan menentukan intensitas atau gradasi. Hal ini tampak dari fakta bahwa perbedaan gradasi itu sangat tidak signifikan untuk semua

jenis konteks, baik yang mengandung fitur (+P), (-P) maupun yang mengandung fitur (+D) atau (-D). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat budaya Mataraman intensitas kontrol sosial dalam ranah kemasyarakatan cukup tinggi pada semua jenis konteks. Hal ini berarti bahwa kritik dalam ranah kemasyarakatan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Implikasinya adalah manakala terjadi sebuah pelanggaran nilai, pelanggaran nilai tersebut cenderung akan bisa segera dicegah dan dikontrol serta tidak dibiarkan berlarut-larut atau dibiarkan berlangsung terus tanpa ada koreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. 1962. *How to do thing with words*. New York: Oxford University Press
- Blim-Kulka, et. al. 1989. "Investigating Cross-cultural Pragmatics: An Introductory Overview" dalam *Cross-Cultural Pragmatics: Request and Apologies*. New Jersey. Ablex Publishing Corporation Norwood
- Brown, Penelope dan S.C. Levinson. 1978. "Universals in Language Usage: Politeness Phenomena". dalam *Question in Politeness*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Berger, Peter L. 1978. *Invitation to Sociology*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.
- Cutting, Joan. 2008. *Peagmatics and Discourse: A Resourse Book for Students*. Second Edition. USA and Canada: Routledge
- Clark, H. 1979. Responding to Indirect Speech act. *Cognitive Psychology* (11). 430-477.
- Edi Subroto, D.H., 2008. "Pragmatik dan Beberapa Segi Metode Penelitiannya" dalam *Kelana Bahana Sang Bahasawan*. Penyunting Khatarina Endriarti Sukamto. Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Fraser, Bruce. 1990. Perspectives on Politeness. *Journal of Pracmatics* 14 (2): 219-236

- Fraser, B dan Nolen W. 1981. The Association of Deference with Linguistic Form. *International Journal of the Sociology of Language* (27): 93-109.
- Gunarwan, Asim. 1992. "Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Kelompok Etnik di Jakarta" dalam *PELLBA 5*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- _____. 1994. "Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik" dalam *PELLBA 7*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- _____. 1994. "Pragmatik: Pandangan Mata Burung" dalam *Menggiring Rekan Sejati*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- _____. 1996. "The Speech Act of Criticizing among Speakers of Javanese". Makalah Dipresentasikan dalam Pertemuan ke-6 South East Asian Linguistics Society. Tidak diterbitkan.
- _____. 1998. "The Ideologi and the Speech Act of Prohibiting among the Batak and among The Javanese" Makalah dipresentasikan pada Konferensi Pragmatik Internasional, Reims, Prancis, 19-25 Juli 1998.
- _____. 2000. "Tindak Tutur Melarang di Kalangan Dua Kelompok Etnis Indonesia: Kearah Kajian Etnopragmatik" dalam *PELLBA 13*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- _____. 2002. "Persepsi Budaya Jawa di Kalangan Orang Jawa: Implikasinya pada Penggunaan Bahasa" dalam *PELLBA 16*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- _____. 2003. "Realisasi Tindak Tutur Pengancam Muka di Kalangan Orang Jawa: Cerminkan Nilai Budaya?" Makalah pada Seminar

Internasional Budaya, Bahasa, dan Sastra, Universitas
Diponegoro, Semarang, 6-7 Oktober 2003

- _____. 2008. "Rasa Kejawen dan Pengungkapan Tindak Tutur Pengancam Muka di Kalangan Orang Jawa" dalam *Kelana Bahana Sang Bahasawan*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Gu, Yueguo. 1990. "Politeness Phenomena in Modern Chinese". *Journal of Pragmatics* 14 (2): 237-257.
- Huang, Yan. 2007. *Pragmatics*. United States: Oxford University Press.
- Hoang Thi Xuan Hoa. 2007. "Criticizing Behaviors by the Vietnamese and the American: Topics, Social Factors, and Frequency". *VNU Journal of Science. Foreign Languages*, 141-154
- Jinsha, Xie. 2009. "Requests in International Business E-mails". Dissertation. Hamburg University
- Koktova, E. 1998. "Implicature, Conversational" dalam *Concise Encyclopedia of Pragmatics*, Edited by Jacob L. Mei. Amsterdam-Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo: Elsevier
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lakoff, Robin. 1973. "The Logic of Politeness; or minding your p's and q's". Papers from the 9th Regional meeting of the Chicago Linguistic Society. 292-305. Chicago. Chicago Linguistic Society.
- Magnis Suseno, Frans. 1988. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.

- MIN Shang-chao. 2008. "Study on the Differences of Speech Act of Criticism in Chinese and English" dalam *US-China Foreign Language*, Maret 2008, Volume 6, No. 3 (Serial No.54).
- Mulac, Anthony et.al. 2000. "Female and Male Managers' Criticism Giving: Differences in Language Use and Effects" dalam *Journal of Language and Psychology*. Vol 19. N0 4. Desember. 2000.
- Marques Reiter, Rosina. 2007. *Linguistic Politeness in Britain and Uruguai: A Contrastive Study of Requests and Apologies*. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nguyen, Minh Thi Thui. 2005. "Criticizing and Responding to Criticism in A Foreign Language: A Study of Vietnamese Learners of English". A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Phillosophy in Language Teaching, The University of Auckland.
- _____. 2008. Criticizing in an L2: Pragmatic Strategies Used by Vietnamese EFL Learners dalam [http// www. reference-global.com/doi/pdf plus/10.1515/IP.2008.003](http://www.reference-global.com/doi/pdfplus/10.1515/IP.2008.003).
- Pranowo. 2009a. *Kesantunan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2009b. "Kesantunan Berbahasa Tokoh Masyarakat Ditinjau dari Apek Pragmatik". Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1978. "Language Etiquette in Indoesian" dalam *Spectrum*. Editor S Udin. Jakarta: PT Dian Rakyat

- Parker, Frank. 1986. *Linguistics for Non-Linguistics*. London: Taylor & Francis, Ltd.
- Roucek, S Joseph. 1965. *Social Control*. New Delhi: W.D. ten Broeck for Affiliated East-West Press Private Ltd.
- Rintell, Ellen M. dan Candace J. Mitchell. 1989. "Studying Requests and Apologies: An Inquiry into Methode" dalam *Cross-Cultural Pragmatics: Request and Apologies*. New Jersey. Ablex Publishing Corporation Norwood
- Searle, J.R. 1971. *The Philosophy of Language*. New York: Oxford University Press.
- _____. 1974. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sutarto, Ayu. 2004. "Wacana Tandingan untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Jawa Timur" dalam *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur.
- Sutopo, H.B., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian*. Edisi ke-2, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

BAHASA *dan* SASTRA *untuk* KEBANGKITAN INDONESIA



Kumpulan tulisan dalam *bunga rampai* ini merupakan suatu gagasan, karya inovatif dan hasil pemikiran yang diprakarsai oleh para dosen dari Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Buku ini berisikan konsep pengembangan tentang kebahasaan, kesastraan dan pernaskahan dari berbagai minat ilmu Linguistik, Filologi dan Ilmu Sastra. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wahana pengetahuan baru bagi pemerhati bahasa, praktisi bahasa, para guru, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya sehingga akan diperoleh kajian ilmu secara mendalam.

Momentum pembuatan buku ini bertepatan dengan berdirinya Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas yang ke-25 sehingga dapat dijadikan sebagai ajang prestasi penulisan karya ilmiah dengan konsep-konsep yang jelas dari hasil penelitian para dosen. Dengan demikian, kita dapat mengkaji dan memberikan kontribusi yang positif dari berbagai kalangan di lingkungan akademisi.

Ketua Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu, Universitas Airlangga



Penerbit dan Percetakan
Jl. Tales II No. 1 Surabaya
Telp 031-72001887, 081249995403

ISBN: 978-602-7567-73-3

